

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

DPRD Minta Pemprov Siapkan Alternatif Pengolahan Sampah Lain

JAKARTA (Poskota) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tengah menyiapkan refuse derived fuel (RDF) sebagai upaya untuk mengatasi sampah di Jakarta. DPRD pun meminta pemerintah juga menyiapkan alternatif lain untuk mengolah sampah yang saat ini masih menjadi masalah.

Anggota DPRD DKI Basri Baco menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba alternatif teknologi pengolahan sampah berupa insinerator. "Selain teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif (refuse derived fuel/RDF), agar menggunakan teknologi lainnya, yakni insinerator," kata Basri yang dikutip, Senin (30/10).

Menurut Basri, insinerator merupakan alat yang digunakan untuk membakar limbah yang dioperasikan dengan memanfaatkan teknologi pembakaran pada suhu tertentu. Hal ini sebagai langkah untuk mengop-

timalkan pengolahan sampah lainnya selain menggunakan RDF.

Terlebih, insinerator ini sudah digunakan di Singapura sejak tahun 1979 hingga saat ini. Adapun insinerator mampu mengolah 90 persen limbah sampah dan sisanya merupakan debu serta sampah yang tidak habis terbakar.

"Daerah di Indonesia yang telah menggunakan insinerator adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua," ujar Basri.

Karena itu, pihaknya mendorong agar Pemerintah Provinsi DKI dapat mengkaji secara mendalam terkait dengan teknologi insinerator tersebut.

Kendati demikian, pihaknya juga mendukung agar pemerintah untuk selalu mengedukasi masyarakat terkait pemisahan sampah organik dan non-organik sehingga memudahkan dalam pengolahan sampah.

Sepeerti diketahui, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyatakan pembangunan tempat pengolahan sampah menjadi bahan bakar RDF di Rorotan, Jakarta Utara, merupakan inovasi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan masalah sampah di Ibu Kota.

"Pembangunan RDF plant merupakan inovasi juga. Jadi, kami kembali bangun di dalam kota (DKI Jakarta) agar sampah itu tidak dikirim ke Bantargebang," kata Humas Dinas Lingkungan Hidup Yogi Ikhwan.

Total besaran anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2024 yang disepakati sebesar Rp81,5 triliun termasuk pinjaman Rp1 triliun untuk RDF Rorotan, Jakarta Utara. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI juga akan membangun RDF Pegadungan, Jakarta Barat. (*/lfn)